

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai, serta rencana pendanaan dalam tahun 2015-2019, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) setiap tahun.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah menjadi Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Sumatera Utara. Sebagai Auditor Internal Pemerintah RI, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana

diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019.

Untuk mewujudkan visinya, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara memiliki tiga misi, yaitu (1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Utara; (2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Sumatera Utara; serta (3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Sumatera Utara.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara menetapkan tiga tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Utara; (2) Peningkatan Efektivitas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Sumatera Utara; dan (3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Sumatera Utara.

Untuk mencapai tujuan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah merumuskan delapan sasaran program sebagai dasar pengukuran kinerja BPKP yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 ini merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja tahun 2017. LKj juga dimanfaatkan sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2017 menunjukkan sebagian besar sasaran program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah tercapai. Sasaran Program dan Kegiatan, berikut capainnya pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel RE.1.

Tabel RE.1
Capaian Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2017

No.	Sasaran Program dan Kegiatan/ Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A Sasaran Program					
Sasaran Program 1 : Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi					
1	Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan Keuangan Negara (tindak lanjut hasil pengawasan)	%	55,00	39,13	71,15
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan Korporasi	%	100,00	37,66	37,66
Sasaran Program 2 : Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian					
3	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan	%	40,00	72,22	180,56
4	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	70,00	100,00	142,86
5	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	60,00	100,00	166,67
6	Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70,00	100,00	142,86
7	Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70,00	100,00	142,86
Sasaran Program 3 : Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional					
8	Persentase Penyelesaian Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan	%	0,00	100,00	0,00
Sasaran Program 4 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi					
9	Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan <i>Fraud Control Plan</i> (FCP) termasuk <i>Fraud Risk Assessment</i> (FRA)	%	50,00	100,00	200,00
Sasaran Program 5 : Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi					
10	Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat	%	60,00	60,00	100,00
Sasaran Program 6 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi					
11	Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	%	0,00	0,00	0,00
12	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota	%	21,00	12,12	57,71

No.	Sasaran Program dan Kegiatan/ Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	(Level 3)				
13	Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	100,00	0,00	0,00
14	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	%	24,00	0,00	0,00
15	Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 1)	%	0,00	100,00	0,00
16	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	55,00	87,88	40,22
17	Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan skor GCG Baik	%	70,00	100,00	142,86
18	Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (Baik)	%	54,00	0,00	0,00
19	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat Baik dari BUMD yang dibina	%	54,00	75,00	138,89
20	Persentase BLUD yang kinerjanya minimal Baik dari BLUD yang dibina	%	60,00	100,00	166,67
Sasaran Program 7 : Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah					
21	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	%	0,00	0,00	0,00
22	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)	%	18,00	6,06	33,67
23	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	100,00	100,00	100,00
24	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	%	64,00	39,39	61,55
25	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)	%	0,00	0,00	0,00
26	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)	%	18,00	54,55	(103,00)
Sasaran Program 8 : Tersedianya dukungan teknis kepuasan atas pelayanan sekretariat utama					
27	Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)	Skala	7	7,32	104,57
B Sasaran Kegiatan					
Sasaran Kegiatan 1 : Terlaksananya monitoring evaluasi dan program prioritas yang dilaksanakan di Daerah					
1	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	146	159	118,66
Sasaran Kegiatan 2 : Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kabupaten					
2	LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	Laporan	42	42	100,00
3	Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kabupaten/Kota	Surat	24	24	100,00
Sasaran Kegiatan 3 : Terlaksananya Bimtek					

No.	Sasaran Program dan Kegiatan/ Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kabupaten				
4	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	Laporan	28	28	100.00
5	Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kabupaten/Kota	Surat	28	28	100,00
	Sasaran Kegiatan 4 : Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan				
6	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	Laporan	12	12	100,00

Keberhasilan capaian sasaran program dan kegiatan diukur dengan persentase pencapaian outcome dan jumlah output rekomendasi untuk sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.

Capaian sasaran program dan kegiatan tersebut sebesar 95,36% dibiayai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp33.065.137.000,00 dengan penyerapan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp31.553.347.369,00.

Kepala Perwakilan,

Sihar Panjaitan
NIP.19581020 198203 1 001